

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT
KAPAL DALAM UPAYA MENUNJANG PROSES KEGIATAN
OPERASIONAL KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM**

TESIS

Oleh

EFRAN DINATA

2102190155



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT
KAPAL DALAM UPAYA MENUNJANG PROSES KEGIATAN
OPERASIONAL KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

EFRAN DINATA

2102190155



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efran Dinata
NIM : 2102190155
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL DALAM UPAYA MENUNJANG PROSES KEGIATAN OPERASIONAL KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 21 November 2023



Efran Dinata
NIM: 2102190155



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL
DALAM UPAYA MENUNJANG PROSES KEGIATAN OPERASIONAL
KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM**

Oleh:

Nama : Efran Dinata
NIM : 2102190155
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 21 November 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 981456/0314086404

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Ketua

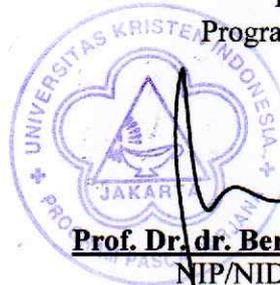
Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Direktur

Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0820116402



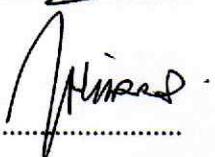
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 21 November 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Efran Dinata
NIM : 2102190155
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL DALAM UPAYA MENUNJANG PROSES KEGIATAN OPERASIONAL KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Sebagai Anggota.....	
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sebagai Anggota.....	

Jakarta, 20 November 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Efran Dinata
NIM : 2102190155
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal
Dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional
Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Kelas Iv Pangkal Balam

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2023

Efran Dinata
NIM: 2102190155

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam”.

Penelitian ini dibuat sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Program Magister, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta semangat oleh orang-orang di sekitar penulis, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.

2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing ke-2 (dua) yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis.
4. Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H selaku Dosen sekaligus Pembimbing ke-1 (satu) yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis.
5. Seluruh Dosen program studi Magister Ilmu Hukum dan Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan para beliau, penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis dihari-hari yang akan datang.
6. Keluarga besar Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam atas dukungan dan bimbingannya, serta telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penulisan tesis dengan baik.
7. Keluarga besar Senat Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk setiap kenangan, kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama-sama selama ini, serta selalu mendukung satu sama lain.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis mengharapkan penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang hukum khususnya mengenai implementasi kebijakan sertifikat kapal.

Jakarta, 21 November 2023

Efran Dinata
2102190155



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN (ORISINALITAS) PENELITIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	13
F. Metode Penelitian	25
G. Orisinalitas Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Landasan Teori	38

1. Teori Sistem Hukum	38
2. Teori Keadilan.....	42
B. Implementasi Kebijakan	52
C. Sertifikat Kapal	64
1. Pengertian Sertifikat Kapal	64
2. Tujuan Sertifikat Kapal.....	67
3. Jenis-Jenis Sertifikat Kapal.....	69
4. Perpanjangan Sertifikat	70
5. Kegiatan Operasional Kapal	72
D. Sejarah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan	75
BAB III	
FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT	
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPANJANGAN	
SERTIFIKAT KAPAL DALAM UPAYA MENUNJANG PROSES	
KEGIATAN OPERASIONAL KAPAL DI KANTOR	
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS	
IV PANGKAL BALAM.....	82
A. Gambaran Umum.....	82
1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam	82
2. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai.....	85

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal	89
1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal.....	89
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal.....	107
3. Pendekatan Teori Sistem Hukum Terhadap Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal	116

BAB IV	IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN	PERPANJANGAN
	SERTIFIKAT KAPAL DALAM UPAYA MENUNJANG PROSES		
	KEGIATAN OPERASIONAL KAPAL DI KANTOR		
	KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV		
	PANGKAL BALAM		125
A. Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal			125
B. Pendekatan Teori Sistem Hukum Terhadap Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal			141

C. Pendekatan Teori Keadilan Terhadap Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal	150
BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	160



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL DALAM UPAYA MENUNJANG PROSES KEGIATAN OPERASIONAL KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM

Implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat merupakan salah satu upaya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam dalam memberikan jaminan keselamatan terhadap aktivitas pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mewajibkan bagi setiap kapal untuk memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Pemberlakuan sertifikat kapal selaras dengan Peraturan Manajemen Keselamatan Internasional (ISM Code) dan Konvensi SOLAS. Penelitian ini bertujuan menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. Teori yang digunakan ialah teori sistem hukum, penggunaan teori sistem hukum untuk mengetahui implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal dari unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kemudian teori keadilan dipergunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal dari perspektif keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif menjelaskan peristiwa umum dan khusus yang terjadi melalui proses berpikir induktif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah ditemukan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal. Terdapat dua faktor pendukung yang terdiri dari faktor pendukung internal (adanya peraturan atau kebijakan, kualitas sumber daya manusia, tersedianya sarana dan prasarana, sertadukungan dari pimpinan) dan faktor pendukung eksternal (sikap pemilik kapal dan kondisi ekonomi, sosial dan politik). Sedangkan faktor penghambat yang terjadi yaitu kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan didapati penggunaan sertifikat yang bersifat sementara. Selanjutnya implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal yang dilakukan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan dijalankan berdasarkan standart operasional prosedur yang berlaku. Kesimpulan penelitian perlunya upaya optimalisasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam untuk meningkatkan implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang berdampak pada proses kegiatan operasional kapal.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikat Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SHIP CERTIFICATE EXTENSION POLICY IN AN EFFORT TO SUPPORT THE PROCESS OF VESSEL OPERATIONAL ACTIVITIES AT THE CLASS IV PANGKAL BALAM PORT AUTHORITY AND PORT AUTHORITY OFFICE

Implementation of the certificate extension policy is one of the efforts of the Harbormaster's Office and Class IV Pangkal Balam Port Authority to provide safety guarantees for shipping activities. Law Number 17 of 2008 concerning Shipping requires every ship to have a sailing approval letter issued by the Harbormaster. The application of ship certificates is in line with the International Safety Management Regulations (ISM Code) and the SOLAS Convention. This research aims to describe, explain and analyze the implementation of the Ship Certificate Extension Policy as well as the supporting and inhibiting factors that influence it. The theory used is legal system theory, the use of legal system theory to determine the implementation of the policy for extending ship certificates from the elements of the legal system, namely the structure of law, the substance of the law, and legal culture. Then the theory of justice is used to determine the implementation of the ship certificate extension policy from a justice perspective. The method used in this research is normative legal research. The research approaches used are a statutory approach and a conceptual approach. Using a qualitative descriptive analysis method to explain general and specific events that occur through an inductive thinking process. The research results obtained were that supporting and inhibiting factors were found that influenced the implementation of the ship certificate renewal policy. There are two supporting factors consisting of internal supporting factors (existence of regulations or policies, quality of human resources, availability of facilities and infrastructure, and support from leadership) and external supporting factors (the attitude of ship owners and economic, social and political conditions). Meanwhile, the inhibiting factors that occurred were the inadequate quantity of human resources and the use of temporary certificates. Furthermore, the implementation of the ship certificate extension policy has been carried out in accordance with existing regulations and carried out based on applicable standard operational procedures. The conclusion of the research is the need for optimization efforts by the Harbor Master's Office and the Class IV Pangkal Balam Port Authority to improve the implementation of ship certificate renewal policies, taking into account the factors that have been identified which have an impact on the process of ship operational activities.

Key Word: Implementation, Ship Certificates, Harbor Master's Office and Class IV Pangkal Balam Port Authority